

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia.

Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan dan perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak, serta untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial, dan kehidupan anak.

Perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan Perundang-undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Dalam undang-undang narkotika tersebut juga disebutkan bahwa narkotika merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia. Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia<sup>1</sup>.

Untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran

---

<sup>1</sup>Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak*, Selaras, Malang, 2010, hlm.11.

bandar narkoba untuk mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan anak dibawah umur dalam bisnis gelap narkoba.

Seorang anak yang ikut serta untuk melakukan perbuatan mengedarkan narkoba, maka perbuatan tersebut termasuk dalam Tindak Pidana Penyertaan. Kata “Penyertaan” dalam Buku I KUHP berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. rumusan ini terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana yaitu yang melakukan perbuatan (*Plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*), yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*), yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).<sup>2</sup> Dengan adanya suatu tindak pidana penyertaan, maka harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.<sup>3</sup> Maka dalam hal ini anak yang digunakan sebagai kurir narkoba dapat dikenakan sanksi pidana karena masing-masing suatu perbuatan pidana harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya penjelasan diatas, penulis memberikan sebuah contoh kasus anak sebagai kurir narkoba dimana perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana penyertaan. Di kutip dari DetikNews, bahwa Seorang pelajar putus sekolah berinisial MH (15) ditangkap aparat Polres Rembang karena

---

<sup>2</sup> Tommy J. Bassang, *Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Lex Crime Vol. IV/No. 5/Juli/2015, hlm 122

<sup>3</sup> Prof. DR.H.Loebby Loqman,S.H., *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana* (Jakarta: Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995), hlm 59.

membawa narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka mengaku menjadi kurir narkoba di wilayah tersebut. “Dimana Pelaku ditangkap saat bertransaksi sabu-sabu di wilayah Kaliori, Rembang,” kata Kapolres Rembang AKBP Sugiharto di mapolres di Jl Pemuda, Jumat (12/5/2017). Pernyataan pelaku bahwa ia sudah tidak bersekolah lagi dan bukan warga Rembang. Pelaku juga mengaku hanya menjadi kurir saja. “Saat ditangkap di area SPBU Purworejo di Kecamatan Kaliori petugas menemukan barang bukti sabu-sabu. Pelaku juga mengaku sebagai kurir sabu-sabu,” katanya. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa satu paket sabu-sabu terbungkus plastik klip bening, satu bungkus rokok, dan uang senilai Rp 146 ribu. Sementara itu Kasat Resnarkoba Polres Rembang AKP Bambang Sugito menambahkan meski pelaku masih tergolong anak-anak tetap harus menjalani proses hukum karena tindak pidana kasus narkoba.<sup>4</sup>

Dari kasus tersebut bahwa seorang anak sudah mengetahui barang apa yang dibawanya serta anak tersebut mengakui bahwa ia menjadi kurir narkoba. Dengan ia mengakui menjadi seorang kurir narkoba, maka anak tersebut sudah turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana. perbuatan tersebut sudah memenuhi syarat dari perbuatan turut serta. Syaratnya yaitu adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan adanya kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan ancaman pidana.

---

<sup>4</sup> Arif Syaefudin, *Jadi Kurir Narkoba Anak Usia 15 Tahun Ditangkap Polisi*, dalam DetikNews <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3499351/jadi-kurir-narkoba-anak-usia-15-tahun-ditangkap-polisi>, Akses 1 Mei 2018.

Adapun juga kasus lain yaitu Seperti yang terjadi di Jepara dimana Polres bersama Pemkab Jepara, melakukan deklarasi Pelajar Jepara Anti Narkoba 2018, Rabu (24/1/2018). Salah satu penyebabnya, adalah banyaknya penyalahgunaan narkotika di Bumi Kartini termasuk memanfaatkan pelajar. “Latar belakang kegiatan ini mengingat bahaya narkoba semakin meningkat. Hal ini bisa menjadi bom waktu, bahkan ada murid SD di Jepara yang dimanfaatkan pengedar untuk menjadi kurir,” tutur Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho. Ia menyebut, siswa sebuah sekolah dasar di Mlonggo tersebut memang dimanfaatkan pengedar narkoba karena ketidaktahuan. Yang bersangkutan diberikan uang untuk mengantarkan sebuah paket. Diterangkannya, pada tahun 2017 ada 30 kasus narkoba dengan 36 tersangka. Sementara pada 2016 ada 26 kasus dengan 36 tersangka yang ditangani oleh Polres Jepara. Sedangkan, pada awal tahun 2018 ada tiga kasus yang sedang ditangani oleh Kepolisian Resort Jepara. Oleh karena itu, Kapolres Jepara menganggap kerjasama antar lembaga dalam penanganan narkoba sangat penting. Selain deklarasi anti narkoba, kedepan polisi akan memberikan materi terkait pendidikan anti narkoba ke sekolah-sekolah.<sup>5</sup>

Dengan contoh kasus yang kedua ini, dapat kita lihat bahwa seorang anak tersebut tidak mengetahui apa yang dibawanya. Perbuatan pengedar narkotika dapat memberikan suatu imbalan kepada anak yang diperintahkan untuk menjadi kurir narkotika. Hal ini dilakukan oleh pengedar narkoba karena mereka menganggap seorang anak tidak mampu berfikir dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kepolosan seorang anak juga yang

---

<sup>5</sup> Rifqi Gozali, anak SD di Jepara Tertangkap Saat Jadi Kurir Narkoa, dalam TribunNews, Akses 1 Mei 2018

menjadi dasar dari suatu perbuatan tersebut. Dimana menurut penulis perbuatan ini termasuk sebagai perbuatan tindak pidana penyertaan dikarenakan memenuhi syarat dari turut serta, yaitu seorang anak secara sengaja untuk mengantarkan paket tersebut serta adanya kerjasama yaitu seorang anak akan menerima imbalan atas suatu perbuatan yang dilakukannya. meskipun seorang anak tersebut tidak mengetahui isi paket namun seharusnya patut diduga bahwa barang tersebut adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang. Namun hal ini bisa dikesampingkan dikarenakan seorang anak masih belum mampu untuk berfikir terlalu dalam.

Maka dengan adanya contoh kasus anak yang mengetahui dan tidak mengetahui dia sebagai kurir peredaran narkoba diatas seorang anak dapat diancam pidana. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra. Di satu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian yang beranggapan pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa, artinya agar memberi efek jera bagi si anak.

Menurut Bagir Manan: Bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat(3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CLHukum *Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 10

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkoba harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proporsional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.<sup>7</sup> Anak mungkin tidak mengetahui apa isi dari barang yang diberikan tersebut. Akan tetapi perlakuan yang dilakukan oleh anak tersebut termasuk dalam unsur kesengajaan. Karena anak tersebut menerima barang tersebut untuk dikirimkan. Jadi, perlakuan hukum pada anak di bawah umur pada kasus perdagangan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius.

Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis termotivasi untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan judul

“KEDUDUKAN HUKUM ANAK SEBAGAI TERSANGKA KURIR  
PEREDARAN NARKOBA DITINJAU DARI TEORI PENYERTAAN”

---

<sup>7</sup> Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 7

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hukum anak sebagai tersangka kurir peredaran narkoba jika ditinjau dari teori penyertaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum anak sebagai tersangka kurir peredaran narkoba dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai kurir narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Malang maupun oleh masyarakat luas mengenai masalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum terutama POLRI, BNN, ORANG TUA dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru untuk penulis terkait anak sebagai tersangka kurir peredaran narkoba dan bagaimana sistem peradilan, kedudukan hukum dengan sanksinya di undang undang sistem peradilan pidana anak jo undang undang narkotika

### 2. Bagi Mahasiswa

Memberikan tambahan pengetahuan tentang bagaimana kedudukan hukum, sanksi anak yang dibawah umur sebagai tersangka kurir peredaran narkoba menurut undang undang sistem peradilan pidana anak jo undang undang narkotika

### 3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi masyarakat terkait dengan kedudukan hukum anak dan bagaimana sanksi apabila anak yang dibawah umur menjadi tersangka kurir peredaran narkoba

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronny Hanitojo Soemitro, bahwa: “Metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.”<sup>8</sup> Sementara, dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut :

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pada penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian.

#### b. Pendekatan Sejarah (Historical Approach)

Pendekatan sejarah bertujuan untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam

---

<sup>8</sup> Ronny Hanijo Soemitro, S.H., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 hlm 33

pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.

## **2. Jenis Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki tata urutan peraturan perundangan di Indonesia<sup>9</sup> yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Teori Penyertaan
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan kepada penulis mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan-bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. literature
2. Jurnal-jurnal hukum

## **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun teknik yang digunakan dalam memperoleh bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan kekosongan

---

<sup>9</sup> JohnnyIbrahim, S.H., M.Hum, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 hlm. 295

norma mengenai mengenai regulasi yang mengatur. Bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari studi literatur (*literature study*) dan studi dokumen (*document study*) di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Malang, serta dengan cara mengunduh berbagai jurnal di internet yang berkaitan dengan topik yang hendak dibahas.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data dilakukan secara yuridis normatif, karena bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif. Dalam hal ini memetakan kebutuhan bahan dan diklasifikasikan lebih lanjut untuk ditelaah mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba. Peraturan Perundang-Undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lain sesuai dengan asas hukum yang berlaku.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub-bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini penulis akan menguraikan landasan teori atau kajian teori yang mendukung hasil penelitian dalam membahas permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam Bab III ini akan diuraikan mengenai jawaban terhadap permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam pembahasan akan dikaitkan dengan kajian teori serta landasan yuridis yang tepat.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab IV merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisikan suatu kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian hukum serta saran-saran yang akan diberikan oleh penulis.

